

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Rahmah Ramadhani¹ dan Yusa Djuyandi²

¹Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

²Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email korespondensi: rahmah18002@mail.unpad.ac.id; yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Submitted: 27-12-2022; Accepted: 19-01-2023; Published :24-01-2023

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Latar belakang pemindahan tersebut adalah untuk meminimalisir risiko bencana dan beban kepadatan wilayah DKI Jakarta, serta pemindahan dilakukan ke lokasi tengah wilayah Indonesia dengan lahan yang masih banyak untuk dikembangkan. Namun begitu, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu pemindahan IKN mengenai dampak serta peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan yang diakibatkan. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur yang memandang peran pemerintah berdasarkan perspektif Keynesian dan penelitian yang memanfaatkan berita di media. Pemindahan IKN mempengaruhi aspek ekonomi, politik, dan yang terutama adalah lingkungan. Beban kerusakan yang ditanggung lingkungan Kalimantan Timur disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan IKN yang meliputi deforestasi. Berdasarkan perspektif Keynesian, kontribusi pemerintah atau keberadaan negara bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan optimalisasi perekonomian. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi resiko pemindahan IKN, namun secara bersamaan memanfaatkan sumber daya dan sebagai upaya pemerataan adalah membangun dengan konsep Forest City.

Kata kunci: Ibu Kota Indonesia; Dampak Pembangunan; Kerusakan Lingkungan; Peran Pemerintah

ABSTRACT

The relocation of the capital city of Indonesia has been determined to be moved to East Kalimantan, precisely in the districts of Penajam Paser and Kutai Kartanegara. The background of the relocation is to minimize disaster risk and the burden of the density of the DKI Jakarta area, and the relocation is carried out to a central location in the Indonesian territory with a lot of land to be developed. However, this policy reaps the pros and cons of various groups. For this reason, this paper aims to analyze the issue of transferring IKN (the capital city of Indonesia) regarding the impact and role of the government in overcoming the damage caused. The method used in this analysis is descriptive qualitative with literature study and research that utilizes news in the media. The migration of IKN affects economic, political, and above all environmental aspects. The burden of damage to the environment in East Kalimantan is caused by massive land clearing for IKN development which includes deforestation. Based on the Keynesian perspective, the contribution of the government or the existence of the state aims to maximize the use of resources and optimize the economy. Therefore, one of the government's efforts in overcoming the risk of moving the IKN, but at the same time utilizing resources and as an equalization effort is to build with the Forest City concept.

Keywords: The Capital City of Indonesia; the Impact of development; Environmental Damage; The Role of the Government

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara atau yang disingkat sebagai IKN sedang dilaksanakan persiapannya sebagaimana telah dijelaskan oleh presiden Joko Widodo (Budiman, 2022) mengenai alasannya, yaitu; pemindahan dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana di ibu kota, posisi berada di tengah, strategis dengan wilayah yang berkembang, hingga lahan kosong yang banyak. Namun, rupanya kebijakan ini menuai pro dan kontra. Dampak positif yang akan dihasilkan adalah pemanfaatan segala potensi sumber daya alam yang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan di Kalimantan Timur dan juga akan meningkatkan pendapatan negara. Namun, ada juga dampak negatif yang nantinya akan muncul akibat pemindahan ibu kota. Pembukaan lahan merusak alam karena dilakukan dengan cara membakar hutan dan juga lahan gambut. Pembakaran dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi ekosistem hutan dan masyarakat.

Isu pemindahan ibu kota Indonesia sebenarnya bukan lah isu baru, namun sudah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda, zaman Soekarno, hingga kemudian, isu pemindahan ibu kota kembali diangkat ketika Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan sedang diproses. Memiliki lahan yang sangat luas, saat ini Kalimantan masih dipenuhi dengan hutan yang masih terjaga kelestariannya, seperti lahan gambut. Lahan gambut yang tersebar di Kalimantan adalah salah satu ekosistem besar yang harus diperhatikan pemerintah. Apabila ibu kota baru dipindahkan ke Kalimantan yang akan membuka banyak lahan dengan deforestasi, lahan gambut akan terancam habis dan akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Kalimantan.

Penajam Paser dan Kutai Kartanegara sebagai kabupaten di Kalimantan Timur menjadi lokasi yang sudah ditetapkan sebagai daerah ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, di kawasan ini terdapat hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Dikhawatirkan pembukaan lahan untuk membangun ibu kota baru akan menyebabkan dampak yang termasuk berupa gangguan ekosistem hutan dan lingkungan. Beban kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari karena menurut Greenpeace, dari tahun 2015 hingga 2019, terdapat banyak titik api kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Timur (Theresia et al., 2020a).

Berbagai risiko akan ditimbulkan akibat pemindahan ibu kota baru ke daerah tersebut dan

tidak bisa dipungkiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan semakin mengakibatkan lahan gambut dan hijau lainnya menjadi langka dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek yang kemungkinan terkena dampak dari kebijakan kontemporer ini, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, yang kemudian akan dianalisis juga peran pemerintah dalam mengatasi dampak kerusakan akibat Pemindahan ibu kota ke daerah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2019, program pemindahan ibu kota negara Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam pengumumannya mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Pemindahan tersebut telah ditetapkan pada dua kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, PNS juga direncanakan oleh pemerintah untuk dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut dimulai pada tahun 2024. Hal tersebut akan memberi dampak kepada PNS yang berdomisili di DKI Jakarta.

Pemindahan ibu kota negara yang sudah ditetapkan untuk diletakkan di luar pulau Jawa dan tengah Indonesia diharapkan mendorong perekonomian yang merata. Diperkirakan strategi penempatan wilayah tersebut akan mempengaruhi wilayah disekitarnya, yang mana arus perdagangan akan dirasakan tidak hanya terpusat di pulau Jawa. Selain itu, investasi akan terdorong lebih luas ke wilayah lain, sehingga akan meningkatkan perekonomian nasional dari berbagai sektor. Namun, masih terdapat aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu dalam proses pembangunan proyek pemindahan IKN. 56% tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tersebut merupakan penduduk yang berasal dari Pulau Jawa, sementara hanya 8% penduduk yang berasal dari Pulau Kalimantan (Ria et al., 2020). Proyek yang di atasnamakan untuk kepentingan umum demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata ini merupakan proyek negara yang merupakan proyek jangka panjang.

Berdasarkan perspektif ekonomi Keynesian, ekonomi Keynesian adalah konsep makroekonomi dari ekonom yang merupakan tokoh dari Inggris, John Maynard Keynes, pada tahun 1930-an sebagai upaya untuk mengerti *Great Depression*. Keyakinan utamanya adalah bahwa intervensi pemerintah dapat menstabilkan ekonomi. Keynes percaya bahwa intervensi pemerintah atau negara dibutuhkan, karena apabila kapitalis dibiarkan bekerja sendiri seperti *invisible hand* menurut Adam Smith tanpa regulasi

dari negara, maka pemanfaatan sumber daya yang ada tidak akan maksimal. Kondisi ini akan memaksa pemerintah untuk pada akhirnya tetap melakukan intervensi terhadap pasar. Adanya ketidakstabilan dalam perekonomian kapitalis yang memaksa hadirnya intervensi pemerintah ini menurut Keynes merupakan bantahan terhadap pemikiran tentang *invisible hands* yang dikemukakan oleh Adam Smith (Keynes, 1926).

Keynes menolak gagasan bahwa ekonomi akan kembali ke keadaan keseimbangan alami. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa, begitu penurunan ekonomi terjadi, untuk alasan apa pun, ketakutan dan kesuraman yang ditimbulkannya di kalangan bisnis dan investor akan cenderung menjadi pemenuhan diri sendiri dan dapat menyebabkan periode depresi aktivitas ekonomi dan pengangguran yang berkelanjutan. Menanggapi hal ini, Keynes menganjurkan kebijakan fiskal *countercyclical*, di mana selama periode kesengsaraan ekonomi, pemerintah harus melakukan pengeluaran defisit untuk menebus penurunan investasi dan meningkatkan pengeluaran konsumen untuk menstabilkan permintaan agregat. Banyak ekonom mengkritik pendekatan Keynes. Mereka berpendapat bahwa bisnis yang merespons insentif ekonomi akan cenderung mengembalikan ekonomi ke keadaan ekuilibrium kecuali jika pemerintah mencegah mereka melakukannya dengan mengganggu harga dan upah, membuatnya tampak seolah-olah pasar mengatur sendiri (Keynes, 1926).

Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke pulau Kalimantan mempengaruhi berbagai aspek yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Kalimantan yang akan menghadapi perubahan besar. Terdapat banyak aspek yang akan dipengaruhi dari kebijakan ini, mulai dari aspek ekonomi, politik, hingga lingkungan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif beserta studi literatur yang memandang peran pemerintah berdasarkan perspektif Keynesian dan penelitian yang memanfaatkan berita di media. Metode kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan peneliti di bidang ilmu-ilmu sosial. Menurut Bogdan &

Biklen (1992), metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang hasil akhirnya berupa data seperti perilaku, tulisan, dan ucapan dari yang diamati secara deskriptif, dengan harapan mampu menghasilkan uraian yang komprehensif (Bogdan & Biklen, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Kawasan hutan produksi yang teletak di wilayah ibu kota negara baru memiliki luas 63.434 ha, dimana luas dari wilayah ibu kota negara yang dibangun adalah 256.654 ha. Terdapat dua konsesi di dalamnya, yaitu 37.314 ha milik PT. ITCI Hutani Manunggal dan 16.058 milik PT Inhutani I Batu Ampar. Selain itu, wilayah tersebut sangat beragam keanekaragaman hayatinya, Seluruhnya tersebar di seluruh Kalimantan Timur dengan jumlah tanaman yaitu 527 jenis, 100 jenis mamalia, 180 jenis burung, dan lainnya yang dilindungi dan merupakan endemik. Bahkan terdapat sebaran spesies yang dapat ditemui di tiga jenis hutan tersebut, seperti Lutung Merah, Macan Dahan, Beruang Madu, Orangutan, Kucing Hutan, dan lainnya (Mutaqin et al., 2021).

Dari aspek ekonomi, menurut Hartley (1995) (Saputra et al., 2021), pertimbangan ditetapkannya ibu kota menurut perspektif ilmu ekonomi pertanahan adalah harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, hingga stabilisasi tanpa adanya pengorbanan kesejahteraan masyarakat. Jakarta yang saat ini menjadi pusat roda perekonomian sekaligus pemerintahan, menjadikan kebijakan pemindahan IKN sebagai rencana *long term*, menjadi keputusan tepat untuk meringankan ibu kota yang berat beban. Disebutkan juga bahwa pemindahan ini diharapkan mendorong investasi yang dapat meningkatkan GDP nasional, yang mana sejatinya ibu kota adalah pusat pemerintahan dan pusat perkantoran.

Meskipun diharapkan pemindahan IKN ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan pekerja, pemerataan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, namun pemindahan ini merupakan rencana *long term* atau *long run*, sehingga tidak bisa diharapkan dan dipaksakan dampak positif atau *outcome* yang instan. Akan ada banyak hambatan yang terjadi di dalam prosesnya, seperti dipermulaan pembangunannya adalah kondisi tanah wilayah Kalimantan Timur cenderung gembur, berbeda dengan wilayah Jakarta atau Bandung, sehingga harus dua kali dilakukan untuk menancapkan paku bumi hingga bagian yang keras. Hal tersebut ditakutkan menyebabkan pembengkakan anggaran dan waktu.

Dalam kajian Bappenas, pemindahan IKN dinilai akan menghasilkan dampak positif, dikarenakan perekonomian nasional dinilai akan naik hingga 0.1%. Kenaikan tersebut dinyatakan bersumber dari sumber daya yang dimanfaatkan, seperti pembukaan lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur hingga pembukaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja. Bahkan, Bappenas menilai akan ada peningkatan upah tenaga kerja sebesar 1.37% dan inflasi sekitar 0.2% selama pembangunan IKN diproses. Inflasi tersebut dinilai berasal dari pendapatan masyarakat yang mengalami perbaikan dan kenaikan bahan pokok. Arus perdagangan pun dinilai akan meningkat hingga 50% karena kawasan industri yang tumbuh di kawasan IKN dan terhubung dengan wilayah Indonesia lainnya.

Aspek politik yang ada adalah proses pemindahan IKN yang penuh polemik ini rentan dengan berbagai hambatan. Selain dilaksanakannya di masa pandemi COVID-19, keputusan kebijakan ini dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurut Ujang (Wardhani, 2022), beberapa kalangan masyarakat menolak kebijakan ini karena tidak adanya pemberian fasilitas untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait rencana pemindahan IKN. UU yang dibentuk terkait pemindahan IKN dianggap tidak aspiratif karena tidak dipertimbangkan dan didiskusikan dengan tokoh masyarakat, sehingga terjadi banyak penolakan hingga petisi. Oleh karena itu, perlu pengoreksian agar pemerintah, KSP, dan istana dalam mendengarkan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat justru mengabaikan suara rakyat dan hanya mendengar kepentingan kelompok tertentu.

Sementara itu, aspek lingkungan adalah bagaimana Ibu kota berpindah dari pulau yang berbeda. Aspek ini memiliki banyak kontra, antara lain ditakutkan menjadi pengaruh buruk bagi Kalimantan Timur yang memiliki banyak hutan. Dengan penggunaan banyak lahan untuk pembangunan, maka satwa di hutan juga ikut terancam. Kalimantan Timur yang dikenal sebagai paru-paru dunia juga apabila mengalami degradasi hutan akibat deforestasi, dapat menimbulkan potensi banjir dan emisi karbon (Saputra et al., 2021). Kondisi serupa dialami di beberapa wilayah di Jakarta dan Tangerang, yang mana terjadi banjir di berbagai wilayah akibat pembangunan.

Deforestasi sendiri yang menyebabkan degradasi hutan dan perubahan iklim telah menjadi isu lingkungan yang telah menarik banyak

perhatian dari para pemangku kepentingan selama 40 tahun terakhir. Karena kompleksitasnya, kemungkinan isu ini akan terus menjadi bahan perdebatan di masa depan. Deforestasi dengan berbagai faktor biofisik diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global, yang menjadikan salah satu varian dari penyebab perubahan iklim. Oleh karena itu, Pemanasan global menjadi diyakini akan memiliki banyak dampak negative yang mengancam kehidupan makhluk di bumi. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca, yang mana fenomena tersebut merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan diatasi untuk tidak terjadi dalam kondisi hidup saat ini. Begitu juga mengenai badai tropis, kekeringan, kepunahan spesies, dan banjir, punahnya keanekaragaman hayati hingga degradasi lahan adalah yang pada akhirnya membuat manusia berpikir serius tentang bagaimana menghentikan pemanasan global akibat degradasi hutan yang terjadi karena deforestasi. Upaya ini melibatkan seluruh negara, baik negara maju dan berkembang.

Di Indonesia, deforestasi sudah sering terjadi karena program pembangunan di berbagai wilayah. Deforestasi yang ditujukan untuk pembangunan pemukiman dan infrastruktur serta pemerintahan dan penunjang perekonomian. Selain itu, fungsi hutan sering dialihkan untuk kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dan industri, sehingga menimbulkan konflik. Konflik tidak jarang terjadi antara masyarakat, pengusaha, dan LSM peduli lingkungan. Degradasi hutan Indonesia, di sisi lain, disebabkan antara lain oleh kegagalan pengelolaan hutan, seperti pemanenan yang berlebihan dan regenerasi yang lambat hingga tidak berhasil. Berdasarkan Bank Dunia, disebutkan bahwa hutan tropis Indonesia sudah mengalami degradasi hingga sekitar 1 juta hektar tiap tahunnya. Degradasi atmosfer menjadi salah satu efeknya. Hal ini menjadikan deforestasi Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pemanasan global. Terdapat kontribusi utama empat gas rumah kaca utama, yaitu karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan klorofluorokarbon (Siswoko, 2008).

Perubahan iklim akibat pemanasan global pada akhirnya dapat menyebabkan bencana yang berbahaya. Pola pertanian juga akan berubah akibat pemanasan global, baik di Indonesia maupun global, hingga es di kutub Arktik dan Antartika yang mencair akibat naiknya juga suhu laut dan naiknya permukaan air laut. Semua itu memiliki potensi untuk mengancam seluruh dunia. Isu perubahan iklim ini menarik perhatian internasional dimulai dari ditandatanganinya sebuah perjanjian iklim di Rio de

Janeiro, yang terjadi di tahun 1992. Perhatian internasional terhadap isu perubahan iklim dimulai dengan penandatanganan perjanjian iklim di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Terdapat tiga faktor yang dinilai merupakan penyebab perubahan iklim. Hal tersebut berubah dari masalah ilmiah berkembang menjadi masalah politik secara internasional. Pertama, isu ini telah mendorong banyak akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/LSM) mengadakan berbagai konferensi untuk membahas topik pemanasan global ini. Pada pertengahan 1980-an, berbagai kebijakan iklim memperoleh momentum karena berbagai studi para ilmuwan tentang pemanasan global berhasil ditempatkan ketika pembahasan agenda kebijakan (Siswoko, 2008).

Wilayah Kalimantan Timur akan menerima beban lingkungan yang besar diakibatkan pembangunan yang masif, seperti Gedung pemerintahan, hotel, bandara internasional, rumah sakit, supermarket, mall, apartemen, sarana ibadah, hingga lainnya yang akan mempengaruhi perubahan bentuk wilayah Kalimantan Timur. Perubahan tersebut juga akan meliputi kerusakan lingkungan yang semakin kasat mata akibat perubahan ke arah perkotaan. Peningkatan pembangunan yang akan mengorbankan banyak lahan akan berimplikasi juga terhadap perubahan fungsi kawasan. Dengan berubahnya fungsi kawasan hijau di Kalimantan Timur, maka akan menyebabkan penurunan fungsi kawasan hijau sebagai paru-paru dunia, kawasan penyangga air, dan sebagainya. Hal tersebut juga pada akhirnya mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan, seperti penurunan kualitas udara, tanah, dan air, yang mana digunakan juga sehari-sehari dalam kebutuhan manusia. Penurunan fungsi kawasan tersebut akibat pembukaan lahan secara besar-besaran dengan cara deforestasi berbagai kawasan hijau juga pada akhirnya menyebabkan bencana yang tidak dapat dihindarkan, seperti banjir, kekeringan, hingga longsor.

Tidak hanya dirasakan oleh manusia, deforestasi yang dilakukan dengan di atasnamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat juga berdampak kepada flora dan fauna. Selama ini, Kalimantan Timur merupakan wilayah yang penuh dengan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pembukaan lahan yang dilakukan tentu saja akan merusak habitat berbagai flora dan fauna. Meskipun dilakukan konservasi terhadap flora dan fauna yang terancam, namun semua itu dilakukan dikarenakan ekosistem dan habitat mereka yang

terancam oleh kepentingan pembangunan. Sementara itu, masih banyak flora, fauna, dan organisme yang masih belum ditemukan oleh peneliti. Hal itu juga akan menyebabkan kepunahan flora dan fauna yang belum diketahui. Kepunahan yang terjadi akan menyebabkan terganggunya rantai makanan, ekosistem, sehingga pada akhirnya pembangunan yang terjadi akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Sementara itu, menurut hasil pembicaraan dengan developer dan Anggota DPD RI H.TB. M. Ali Ridho Azhari, S.H, M.I.Kom, tanah wilayah Kalimantan Timur cenderung gembur, berbeda dengan wilayah Jakarta atau Bandung, sehingga harus dua kali dilakukan untuk menancapkan paku bumi hingga bagian yang keras (Polsight, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus matang dalam pembangunan dengan konsep Forest City, agar pembangunan masih bisa selaras untuk melindungi kawasan hutan, keanekaragaman hayati, hingga fungsi hutan sebagai penyerapan karbon.

Ekstraksi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam merupakan tulang punggung perekonomian negara manapun secara nasional, termasuk tanah air Indonesia yang memiliki kekayaan berlimpah dengan sumber daya alam. Faktor-faktor seperti pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi selalu menempatkan tuntutan yang lebih besar di planet ini menyebabkan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal. Deforestasi atas nama pembangunan ekonomi dan sebagai sumber energi domestik berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, menyebabkan erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, penggurunan, kekeringan, banjir, hingga perubahan iklim. Deforestasi hutan rawa gambut tropis sekunder secara signifikan menurunkan PH air tanah, dan beberapa unsur hara makro utama tanah komunal. Semua ini memiliki implikasi negatif bagi pembangunan berkelanjutan dan berbagai mata pencaharian.

Selain itu, efek dari deforestasi adalah perubahan iklim. Pemindahan IKN akan menambah kasus penebangan hutan dan deforestasi di dunia, sehingga akan memberi efek secara global, seperti perubahan iklim. Hal tersebut akan berdampak tidak hanya di masa kini yang sudah terlihat pencairan es di kutub, namun akan lebih parah lagi di masa depan dan akan membahayakan manusia. Tidak hanya di masa sekarang, namun dampaknya juga akan menjadi lebih parah di masa yang akan datang.

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kerusakan Akibat Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Kerusakan di Indonesia akibat deforestasi tidak hanya saat pembangunan pemindahan ibu kota

Indonesia. Sejarahnya, pada awal tahun kemerdekaan Indonesia di pemerintahan Presiden Sukarno, sektor kehutanan merupakan sektor belum terlalu tersentuh dan eksploitasi hutan yang dilakukan secara besar-besaran saat itu belum berkembang seperti sekarang. Setelah itu, pasca Orde Lama runtuh, rezim Orde Baru mulai mengusahakan pertumbuhan pendapatan dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam, yang juga termasuk hutan untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat berbagai faktor. Setelah diberlakukannya UU penanaman modal, sumber daya alam hutan dilakukan pemanfaatannya secara masif. Selain itu, Pemerintah juga mendorong usaha di masyarakat yang meliputi bidang perhutanan.

Setelah pemberlakuan aturan tersebut, perhutanan menjadi sektor percepatan pertumbuhan pendapatan negara. Dari hal tersebut juga, negara memperoleh besar keuntungan. Hal tersebut juga berguna untuk pembangunan dan membayar hutang luar negeri. Bahkan, Indonesia pada awal tahun 1990-an mendominasi pasar yang berupa produk kayu. Indonesia mendominasi produksi dari hutan tropis baik berupa kayu mentah hingga kayu olahan dan mengalahkan negara-negara berkembang lainnya. Meskipun terdengar menggembirakan, terdapat beban lingkungan yang besar dan kebijakan yang tidak disertai upaya untuk mengembalikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan tempo yang sama dengan pemanfaatannya. Hingga kini, banyak kebijakan yang hanya berfokus kepada upaya ekonomi, namun tidak memperhatikan kerusakan dan dampak lainnya.

Menurut Departemen Kehutanan tahun, pada tahun 2003 Indonesia mengalami degradasi hutan hingga 43 juta hektar dari 120,35 hektar, dan terus berlanjut. Dilanjut pada tahun 2004, Indonesia kehilangan miliaran akibat pembalakan liar. Apabila melihat kenyataannya, negara-negara maju sudah mengalami industrialisasi dengan sumber daya hutan sebagai korbannya. Namun, mereka berpendapat bahwa kontribusi besar pemansan global dan kerusakan lainnya adalah akibat dari deforestasi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun tuduhan tersebut ditolak oleh para negara berkembang, konflik kepentingan tersebut dimenangkan negara maju. Cara yang digunakna adalah dengan berbagai kebijakan, dengan misalnya ketika Indonesia harus menandatangani Letter of Intent IMF atau Dana Moneter Internasional yang mengontrol negara-negara maju untuk dihindarkan dari monopoli di

pasar kayu, seperti di Indonesia.

Dari kesepakatan tersebut, Badan Pemasaran Bersama atau BPB dibubarkan apabila menjual produk kayu Indonesia, meskipun lembaga tersebut sudah berhasil mengontrol dan mengatur distribusi kegiatan ekspor kayu dari Indonesia. Dengan dibubarkannya badan tersebut, industri kayu lapis Indonesia memungkinkan untuk menjual langsung produknya ke luar negeri dengan jumlah berapa pun dan relatif lebih murah di negara maju. Hal itu melindungi para negara maju dari ancaman perusakan lingkungan, namun tidak di negara berkembang seperti Indonesia. Apabila melihat dari kejadian tersebut, pemerintah harus belajar untuk lebih bijak dalam menyusun strategi untuk pembangunan, seperti yang terjadi sekarang dalam pemindahan Ibu Kota Negara, agar tidak terjadi kerugian di negara dan keuntungan dari pihak luar. Pemerintah Indonesia tidak boleh terprovokasi oleh tawaran negara lain yang ingin membantu dengan akibat kerugian yang terjadi di negara berkepanjangan.

Selain itu, masyarakat Indonesia tidak serta merta harus mengadopsi ide-ide dari negara maju untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di negara ini. Masyarakat Indonesia harus percaya bahwa negara ini memiliki nilai-nilai luhur dan budaya yang harus dilestarikan, dan tidak boleh mengimpor nilai dan budaya dari negara lain yang belum tentu lebih baik. Rakyat Indonesia lah yang paling mengetahui segala permasalahan yang ada di negeri ini dan bagaimana cara terbaik untuk bekerja mengatasinya. Misalnya, pengembangan sektor kehutanan memerlukan strategi yang sangat berbeda dengan strategi pembangunan tradisional dengan unsur universal modal, tenaga kerja dan investasi.

Strategi pembangunan hutan dicirikan oleh fakta bahwa mereka harus selalu diwarnai dan dibatasi oleh aspek ekologi yang sangat spesifik. Selanjutnya, strategi pembangunan hutan harus memperhatikan partisipasi dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan selalu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Pada dasarnya negara Indonesia tidak harus menyesuaikan citra atau warna masa depan hutan dengan konsep dan gagasan bangsa lain, tetapi memiliki visi pembangunan hutan, tergantung pada kondisi ekologi, nilai dan budaya. dapat menentukan misi. masyarakat Indonesia sendiri.

Berdasarkan perspektif Keynesian, terdapat poin penting yang akan ditelaah dalam tulisan itu, yaitu peran pemerintah dalam mengatasi dampak kerusakan sumber daya alam akibat Pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah pasti memiliki nilai positif dan

negatif yang masih memiliki kekurangan meskipun bertujuan untuk hal yang positif. Namun, pemerintah Indonesia sendiri seringkali melanggar kebijakan yang telah dibuat, padahal dampak dan konsekuensinya sudah diketahui. Sebagai aturan hukum yang diatur dengan undang-undang, upaya pemulihan dan perlindungan lahan gambut di Indonesia mewajibkan pelestarian lahan gambut yang dilindungi sebagaimana diatur.

Namun, justru pemerintah memindahkan ibu kota baru atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana daerah tersebut memiliki lahan gambut besar dan yang nantinya berpotensi mengancam perlindungan lahan gambut akibat pembangunan ibu kota baru. Perlindungan lahan gambut di Indonesia telah di atur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peraturan Pemerintah 71/2014 dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, UU 32 tahun 2000 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UUD 1945. Peraturan tersebut melarang pembukaan lahan di kawasan gambut, yang mana menjadi anomali ketika ibu kota baru mengancam perlindungan lahan gambut (Theresia et al., 2020a). Apabila Kalimantan Timur yang memiliki banyak kawasan hijau termasuk lahan gambut, maka hal tersebut sudah melanggar pasal yang tertera dan akan banyak beban kerusakan lingkungan yang berlanjut.

Berdasarkan perspektif Keynesian, kontribusi pemerintah atau keberadaan negara bertujuan untuk maksimalisasi pemanfaatan sumber daya dan optimalisasi perekonomian. Namun yang justru terjadi di Indonesia terkait isu ini adalah justru aspek pelestarian sumber daya alam dikesampingkan. Meskipun faktor dari Pindahan ibu kota dilaksanakan karena kondisi ibu kota Jakarta yang sudah terlalu padat dan penuh resiko bencana seperti banjir, namun pembukaan lahan di wilayah lahan gambut akan menyebabkan hal serupa dalam jangka waktu panjang. Pemerintah harus melakukan strategi yang menjadikan Pindahan ibu kota ke kawasan baru tidak terulang permasalahannya kembali seperti ibu kota negara Jakarta yang pada akhirnya tata kotanya sudah terlanjur tidak bisa dibenah sedari awal kembali.

Kapasitas yang memadai harus dimiliki pemerintah dalam hal melindungi dan mengelola lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatannya yang kemudian pengawasannya. Pindahan ibu kota baru harus diperhatikan

karena akan mengancam kelestarian lahan gambut, dan pelaksanaannya harus sejalan tujuan mengapa daerah terkait diberikan otonomi. Meskipun begitu, kualitas hidup masyarakat dalam hal upaya peningkatannya tidak akan terlepas dari pemanfaatan sumber daya, namun juga tidak lepas dari peran lingkungan, sehingga akan mempengaruhi berbagai aspek termasuk sosial dan ekonomi. Upaya tersebut menjadi motif utama bagaimana pembangunan berkelanjutan direncanakan dan dijalankan. Peran pemerintah daerah sangat penting karena implementasinya dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik memerlukan kemampuan pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lingkungan.

Namun begitu, kualitas hidup manusia akan terpengaruh apabila beban lingkungan yang tidak terkontrol disebabkan oleh kerusakan dan pencemaran. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memenuhi hal tersebut, karena diperlukannya lingkungan dan kota dengan kondisi tertata dan bersih. Peran pemerintah daerah yang juga melibatkan masyarakat dalam otonomi daerah diperlukan untuk membangun strategi mengelola lingkungan dan sumber daya alam di daerah terkait. Pemerintah daerah melalui desentralisasi memiliki peran besar untuk menjaga dan mengelola lingkungan serta sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Meskipun begitu, masih banyak kendala dan tantangan setiap Lembaga untuk menjalankan fungsinya (Theresia et al., 2020b). Pada persoalan pemindahan IKN ini, proses sejak awal diumumkannya seharusnya sudah mendengar aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Konsep Forest City dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Proses pemindahan IKN secara politis yang terletak di Kalimantan Timur akan menghadapi banyak permasalahan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Dalam pengembangan dan kelanjutannya, pembangunan harus memastikan bahwa fungsi hutan dan keanekaragaman hayati tidak mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan secara besar-besaran. Karena itu, menghadapi permasalahan ini memunculkan konsep Forest City. Oleh Stefano Boeri, Forest City merupakan kota yang bangunannya ditutupi tumbuhan. Tumbuhan atau pohon akan memiliki peran untuk mengendalikan polusi dan diharapkan sebagai vegetasi kota untuk menurunkan suhu, kebisingan, dan tetap menyediakan habitat untuk keanekaragaman hayati. Konsep ini mengacu kepada pembangunan yang tetap mempertahankan ekologis hutan dan pengelolaan lingkungan yang juga sejalan

dengan peningkatan kualitas hidup (Mutaqin et al., 2021).

Konsep Forest City sudah diterapkan di beberapa kota negara lain yang bisa dijadikan contoh, seperti di Cina. Konsep ini dipraktikkan sebagai upaya untuk menghijaukan kembali kota akibat pembangunan yang meliputi kerusakan lingkungan. Di Cina sendiri, konsep ini masif dikembangkan untuk memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan akibat polusi perkotaan dan industri. Dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, lebih dari ratusan kota di belasan provinsi (200 kota dan 18 provinsi) sudah menjalankan konsep Forest City semenjak tahun 2004 silam, dengan kawasan hutan yang sudah meningkat sebesar 13.333 ha. Konsep ini identic dengan kota yang dibangun dari hutan, memiliki banyak tutupan pohon, perbaikan ekosistem kota dengan konstruksi hutan guna menyeimbangkan spesies lain dan manusia, kota yang rimba dengan struktur dan fungsi yang seperti hutan, dan lainnya (Mutaqin et al., 2021).

Proses pemindahan IKN yang menuai polemik ini mendapati pro dan kontra dalam setiap aspeknya. Mulai dari aspek sosial mengenai migrasi penduduk, politik dalam perencanaan kebijakannya, ekonomi dalam segi modal dan harapan pemerataan, hingga lingkungan Kalimantan Timur yang ditakutkan terancam mengalami kerusakan. Meskipun ini merupakan agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diharapkan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, banyak anggapan bahwa kebijakan ini cenderung mementingkan kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, dalam rencana *long term* ini, pemerintah sebaiknya sematang mungkin merencanakan pembangunan ini secara visioner dalam jangka tahun yang lama ke depannya dalam berbagai aspeknya.

Penerapan forest city sebagai konsep pembangunan ibu kota baru adalah kota hutan didominasi dan berdampingan dengan ruang terbuka hijau seperti hutan agar memiliki fungsi yang serupa dengan hutan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk berdampingan bersama pasar atau investor untuk pemanfaatan sumber daya. Kemudian juga, pembangunan forest city ini akan memperhatikan seluruh ekosistem hutan karena dirancang untuk berdampingan dengan alam. IKN dirancang sebagai forest city menjadi sebuah bentuk komitmen Indonesia menghadapi isu peningkatan kualitas hidup dan isu lingkungan hidup.

SIMPULAN

Rencana pembangunan IKN akan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan kembali untuk keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan IKN dengan memindahkan Ibu Kota ke wilayah baru adalah hasil evaluasi pemerintah terkait Ibu Kota Jakarta. Dengan tujuan meringankan Jakarta yang sudah padat penduduk, pembangunan, dan pusat pemerintahan, pemindahan IKN diharapkan mendorong investasi yang dapat meningkatkan GDP nasional dan pemerataan. Namun, pembangunan IKN dilakukan di kawasan yang kaya akan sumber daya alam serta keberagaman hayati-nya. Hal tersebut menyebabkan pembangunan ini akan mengakibatkan terjadinya ekstraksi, eksplorasi, dan eksploitasi di lahan baru. Proses tersebut akan berlanjut mempengaruhi aspek lainnya. Sejatinya, proses pemindahan IKN akan berdampak ke berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, hingga lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah 71/2014 perlindungan lahan gambut di Indonesia telah diatur. Namun, pemerintah justru memindahkan ibu kota baru atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana daerah tersebut memiliki lahan gambut besar dan yang nantinya berpotensi mengancam perlindungan lahan gambut akibat pembangunan. Kebijakan pemerintah memindahkan IKN ini bertentangan dengan kebijakan lainnya Indonesia terkait lahan gambut dan lingkungan hidup. Berdasarkan perspektif Keynesian, kontribusi pemerintah atau keberadaan negara bertujuan untuk maksimalisasi pemanfaatan sumber daya dan optimalisasi perekonomian. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi resiko pemindahan IKN adalah membangun dengan konsep Forest City.

Rencana pembangunan IKN yang terletak di kawasan hutan memerlukan berbagai upaya agar dapat mempertahankan keberlangsungan hutan tersebut. Berdasarkan perspektif Keynesian, peran pemerintah berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Ekstraksi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam merupakan tulang punggung perekonomian negara manapun secara nasional, termasuk Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam. Faktor-faktor seperti pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi selalu menempatkan tuntutan yang lebih besar di planet ini menyebabkan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal. Dalam perspektif tersebut, pemindahan ibu kota merupakan proyek yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam prosesnya, akan banyak beban lingkungan yang

akan berdampak kepada penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar Pemindahan IKN tidak sia-sia dalam rencananya dan dapat memberi wajah baru bagi Indonesia yang *supportif* terhadap seluruh daerahnya dengan melakukan pemerataan dan pembangunan yang tidak destruktif terhadap lingkungan untuk kesejahteraan rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Padjadjaran yang telah mewadahi untuk penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. [https://www.scirp.org/\(S\(lz5mqp453ed5np55rrgjt55\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1305939](https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453ed5np55rrgjt55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1305939)
- Budiman, A. (2022). *Lima Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur - Nasional*. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>
- Keynes, J. M. (1926). *The End of Laissez-Faire*. <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON246/John%20Maynard%20Keynes%20Laissez%20faire%201926.pdf>
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>
- Polsight. (2022). *Polsight Talks 4 | Ibu Kota Nusantara (IKN); URGENSITAS dan DAMPAKNYA APA? Ini tanggapan DPD RI??!* - YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZiSEAnX8kig>
- Ria, R., Hasibuan, A., & Aisa, S. (2020). *DAMPAK DAN RESIKO PERPINDAHAN IBU KOTA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA*.
- Saputra, S. D., Gabriel J, T., & Halkis, M. (2021). ANALISIS STRATEGI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI KASUS UPAYA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI DKI JAKARTA KE KUTAI KARTANEGARA DAN PENAJAM PASER UTARA) STRATEGY ANALYSIS RELOCATION OF THE CAPITAL CITY OF INDONESIA FROM DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE (CASE STUDY OF RELOCATION OF THE CAPITAL CITY FROM DKI JAKARTA TO KUTAI KARTANEGARA AND PENAJAM PASER UTARA). In 192 | *Jurnal Ekonomi Pertahanan* / (Vol. 7).
- Siswoko, B. (2008). *Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim Development, Deforestation and Climate Change: Vol. XIV* (Issue 2).
- Theresia, Ricky Martin Sihombing, & Florentina Simanungkalit. (2020a). THE IMPACT OF INDONESIA CAPITAL RELOCATION TO KALIMANTAN PEATLAND RESTORATION. *Sociae Polites*, 21(2), 231–241. <https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2262>
- Theresia, Ricky Martin Sihombing, & Florentina Simanungkalit. (2020b). THE IMPACT OF INDONESIA CAPITAL RELOCATION TO KALIMANTAN PEATLAND RESTORATION. *Sociae Polites*, 21(2), 231–241. <https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2262>
- Wardhani, G. W. (2022). *Pengamat Ungkap Alasan Terjadinya Polemik Pembangunan IKN Nusantara hingga Munculnya Petisi - Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/pengamat-ungkap-alasan-terjadinya-polemik-pembangunan-ikn-nusantara-hingga-munculnya-petisi>